EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP IZIN LINGKUNGAN TERKAIT USAHA TOKO MODERN DI KABUPATEN SAMPANG

Banie Ageng Salasati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

lalasalasatibas@yahoo.co.id

Hananto Widodo,S.H.,M.H

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan pada pasal 2, setiap usaha dan/ kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Pada faktanya pelaksanaan di lapangan tidak selalu seperti yang diharapkan pembuat peraturan perundang - undangan. Salah satunya pelaku usaha toko modern di Kabupaten Sampang yang merupakan usaha yang wajib UKL-UPL terbukti masih banyak tidak memiliki Rekomendasi UKL-UPL/ Persetujuan SPPL yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota setempat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern serta menganalisis kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern di Kabupaten Sampang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern di Kabupaten Sampang kurang efektif karena dari kelima faktor efektivitas yang terpenuhi hanya dua unsur saja yaitu faktor hukum dan faktor sarana sedangkan yang tidak terpenuhi ada tiga yaitu faktor penegakan hukum, masyarakat, kebudayaan. Adapun kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang dalam melaksanakan proses penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern yaitu tingkat kesadaran dari masyarakat masih kurang mengenai peraturan izin lingkungan, serta kekurangan koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dengan Kesatuan Polisi Pamong Praja, sehingga Kesatuan Polisi Pamong Praja mendatangi yang berizin dan tidak berizin dengan jumlah aparat penegak hukum yang minimum menjadi tidak seimbang dengan jumlah usaha toko modern yang ada di Kabupaten Sampang.

Kata Kunci : efektivitas, penegakan hukum administrasi, izin lingkungan, usaha toko modern

Abstract

Government Regulation Number 27 of 2012 concerning environmental permits in article 2, every business and / or activity those who are required to have Environmental Impact Analysis (EIA) or UKL-UPL must have an environmental permits. In fact, implementation in the field does not always meet the legislators expect. One of them is a modern shop business in Sampang Regency which is a business that obliged to be UKL-UPL proven that there are still many who do not have UKL-UPL Recommendations / SPPL Approval issued by the local Regency / City Environmental Office. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of administrative law enforcement on environmental permits related to modern shop business and analyze the obstacles faced in implementing administrative law enforcement on environmental permits related to modern store businesses in Sampang Regency. This study uses a type of empirical juridical research. The analysis used is descriptive qualitative. Data collection is done through interviews and documentation. The results showed that the effectiveness of administrative law enforcement on environmental permits related to modern store businesses in Sampang District was less effective because of the five effectiveness factors, only two elements were fulfilled, which are legal factors and facility factors while those that are not fulfilled there are three namely law enforcement factor, society, culture. The obstacles faced by the Environmental Office and Sampang District Civil Service Police in carrying out the administrative law enforcement process towards environmental permits related to modern store business, which are the awareness level of the community that still lacks against environmental permit regulations, lack of coordination of the Environmental Office with Enforcement Officer of Regional Regulation so that Enforcement Officer of Regional Regulation came to those who were licensed and unauthorized with the minimum number of law enforcement officers being out of balance with the number of modern shop businesses in Sampang Regency.

Keywords: effectiveness, administrative law enforcement, environmental permission, modern shop business

PENDAHULUAN

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan dengan dianalisis sejak awal perencanaannya. Untuk menunjang hal tersebut diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal, sedangkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL, sementara usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa :

“Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan”.

Izin Lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau Kegiatan, dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Sehingga Penerbitan izin lingkungan, menjadi persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Tujuan diterbitkannya izin lingkungan untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan upaya pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan hidup, memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan perizinan untuk usaha dan/atau kegiatan, serta memberikan kepastian hukum pada usaha dan/atau kegiatan. Sehingga menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberi informasi yang luas dan mendalam mengenai dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut. Sehingga informasi tersebut maka pengambil keputusan dapat mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana usaha dan/atau kegiatan itu layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, sehingga Izin lingkungan dapat diterbitkan.

Perizinan merupakan pelaksanaan fungsi pengaturan yang memiliki sifat sebagai pengendali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dan berasal dari pemerintah. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota, dan izin untuk

melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan.

“Terdapat salah satu berita di Kabupaten Sampang oleh Kabid Penataan dan Pengelolaan Lingkungan (PPL) Dinas Lingkungan Hidup (DLH), mengatakan bahwa toko modern terus menjamur di Sampang. Hal ini tidak ditopang dengan kesadaran pelaku usaha untuk tertib administrasi rendah, buktinya dari 75 toko modern yang ada 50 diantaranya tidak mengantongi izin lingkungan. Izin lingkungan dimaksud izin Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UPL). Ketentuan itu mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 mengenai kewajiban pelaku usaha dan usaha retail. Jika luas area sekitar 500 meter persegi, harus mengurus izin UKL-UPL.”

Usaha toko modern merupakan toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan sesuai Pasal 1 ayat 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, bahwa:

“Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin gangguan dan atau ijin lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.”

Menurut fakta dilapangan dari 65 usaha toko modern hanya 14 yang memiliki, sedangkan sisanya 51 tidak memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang. Maka disini terlihat bahwa masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki izin lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan. Semua ketentuan usaha toko modern intinya harus memenuhi aturan yang berlaku sesuai izin perundang-undangan tentunya dibidang lingkungan, karena mengingat usaha toko modern ini nantinya agar tidak ada timbul kerugian bagi masyarakat disekitar usaha. Jadi, bagi pelaku usaha toko modern yang masih melanggar nantinya akan dikenakan sanksi administrasi Pasal 34 Peraturan daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat, berbunyi :

“(1) Setiap orang yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan Sanksi Administrasi.

(2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Pencabutan Izin;
- b. Denda administrasi; atau
- c. Sanksi paksaan pemerintah (bestuur dwang).”

Pemberian Sanksi administrasi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Satpol PP dalam ketertiban izin lingkungan terkait usaha toko modern, sesuai Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Hal-hal inilah yang mengakibatkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat sekitar usaha toko modern. Maka bisa dikatakan bahwa peranan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol pp dalam penegakan hukum administrasi sangatlah penting untuk diperhatikan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern di Kabupaten Sampang, serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern di Kabupaten Sampang.

Teori kajian pustaka yang peneliti gunakan yaitu tentang efektivitas hukum. Pada dasarnya efektivitas terbagi berbagai macam faktor yang nantinya mempengaruhi efektivitas dari suatu perundang-undangan karena suatu aturan dapat terlaksana atau tidaknya dari faktor-faktor dalam efektivitas ini. Faktor-faktor ini terdiri dari faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Peneliti juga menggunakan teori kajian pustaka tentang penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu usaha yang bertujuan untuk mewujudkan ide-ide agar menjadi kenyataan. Ide-ide ini untuk nilai-nilai yang memuat dalam keadilan, kemanfaatan sosial, dan lain-lain. Fungsi penegakan hukum ini untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup manusia yang seharusnya dilaksanakan dengan baik. Jadi, penegakan hukum ini tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum saja tetapi juga tugas dari setiap orang, walaupun pihak pemerintah yang paling bertanggung jawab dalam penegakan hukum tersebut.

Pelaku usaha toko modern juga harus memperhatikan aturan tentang izin lingkungan. Perizinan merupakan suatu keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga

masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, perizinan ini merupakan bentuk pelaksanaan dari fungsi dan pengendalian secara administrasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan ini juga harus berbentuk tertulis.

Setiap pemilik toko modern tentu harus melalui persyaratan administrasi permohonan izin lingkungan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2014 tentang izin lingkungan kabupaten sampang. Toko modern ini merupakan usaha di bidang perdagangan yang merupakan usaha wajib UKL-UPL. Hal yang terpenting dalam usaha ini yaitu pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan berupa Rekomendasi UKL-UPL/ Persetujuan SPPL yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis, yang mana mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji yaitu perilaku yang timbul adanya interaksi dengan sistem norma yang ada. Cara memperoleh data melalui data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

Lokasi pada penelitian ini diantaranya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang dan pelaku usaha toko modern (minimarket) Kabupaten Sampang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara kepada informan Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, pelaku usaha toko modern (minimarket) di Kabupaten Sampang, serta dokumentasi. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan diantaranya buku, jurnal, dan referensi lainnya.

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya yaitu pengolahan data. Dalam penelitian ini peneliti memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan, terutama kelengkapan jawaban yang diterima. Data dalam penelitian ini harus dikualifikasi, artinya bahwa semua data harus ditempatkan dalam kategori yang ditentukan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti menganalisis untuk memaparkan atas subjek sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Pendekatan analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yakni data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata.

Proses ini dapat dilakukan dengan cara menarik kesamaan nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai fakta yang selanjutnya dirumuskan pada UUPPLH.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang izin lingkungan dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2018 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Informan disini mewakili dalam memberikan informasi mengenai izin lingkungan terkait usaha toko modern oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang yang sebagai informannya adalah Bapak Moh. Zainullah selaku Kepala Bidang Penataan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang.

Kabupaten Sampang merupakan salah satu dari 9 Kabupaten/Kota yang telah memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dari 500 lebih Kabupaten/Kota di Indonesia yang artinya dapat membangun toko modern karena telah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Wajar jika usaha toko modern terus bertambah, selain itu Kabupaten Sampang menjadi Kecamatan paling banyak dari Kabupaten lain di Madura. Namun secara geografis Kabupaten sampang dikenal akan daratan rendah sehingga mudah banjir. Mengingat usaha toko modern yang semakin bertambah juga harus memperhatikan dari segi lingkungan akibat dari usaha tersebut, dengan mengurus izin lingkungan berupa Rekomendasi UKL-UPL/SPPL sesuai Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sampang. Dari definisi tersebut bahwa izin lingkungan dilakukan pada saat kegiatan belum beroperasi dan untuk mendapatkannya rencana usaha toko modern harus sudah memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan ini akan menjadi persyaratan dalam memperoleh izin operasi rencana usaha, sehingga izin usaha tidak akan diterbitkan jika izin lingkungan tidak ada dan izin lingkungan tidak akan diterbitkan jika tidak ada formulir UKL-UPL/SPPL. Namun beberapa pelaku usaha telah memiliki izin usaha dan melewati izin lingkungan, tentunya hal ini tidak sesuai prosedur perizinan.

Hal tersebut senada dengan yang dinyatakan oleh Bapak Ir. Moh. Zainullah, M.SI selaku Kepala Bidang Penataan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang mengatakan bahwa: "Sebetulnya pelaku usaha toko modern sebelum memiliki izin usaha harus memiliki izin lingkungan, minimal SPPL. Dengan adanya izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup juga membantu pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan izin

lingkungan dan peraturan perundang-undangan serta mengantisipasi dampak lingkungan yang kemungkinan terjadi.

Berkembangnya usaha toko modern wajib memiliki izin lingkungan sehingga dapat dilakukan pengawasan secara langsung mulai dari pekarangan usaha, kebersihan tempat, kapasitas area dan kriteria bangunan, hingga terkait dengan limbahnya, serta penertiban ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan berupa Rekomendasi UKL-UPL/SPPL yang ada pada toko modern tersebut. Pengawasan disini meliputi pemantauan, meminta keterangan, memotret, memeriksa peralatan, memantau pengelolaan limbah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Moh. Zainullah menyatakan, Pengawasan itu sendiri dilakukan mampu untuk meminimalisir terjadinya suatu dampak yang akan terjadi. Maka dari itu adanya izin lingkungan berupa Rekomendasi UKL-UPL/ Pesetujuan SPPL, bisa menerangkan ke masyarakat maupun dinas terkait bahwa usaha toko modern ini telah memenuhi persyaratan perizinan usaha yaitu izin lingkungan.

Pasal 19 Perbup No. 16 Tahun 2014 dapat dijelaskan oleh Bapak Moh. Zainullah, M.SI selaku Kepala Bidang Penataan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, bahwa:

Tugas pemerintah daerah terkait izin lingkungan usaha toko modern harus dilakukan upaya sistematis dan terpadu karena untuk melindungi lingkungan hidup, dengan cara melakukan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait pencegahan adanya dampak dari usaha toko modern dengan melakukan pengawasan ke lapangan. Kemudian untuk upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Kabid Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai tugas pokok mereka yaitu mensosialisasikan hal-hal itu untuk menyebarluaskan informasi. Menyebarluaskan informasi selain himbauan melalui sosialisasi kemudian lewat media media cetak seperti koran.

Tindak lanjut dari pengawasan serta penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan berupa Rekomendasi UKL-UPL/SPPL dalam Perbup No. 16 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan, Bapak Moh. Zainullah, M.SI, selaku Kabid Penataan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang menjelaskan bahwa:

Dengan banyaknya pelaku usaha toko modern yang ada di Kabupaten Sampang, serta mengingat jumlah dari keseluruhan dengan yang sudah memiliki izin lingkungan berupa Rekomendasi UKL-UPL/SPPL yang bersifat wajib untuk dimiliki oleh setiap toko modern ini sangat tidak seimbang dan cenderung lebih dari setengahnya tidak memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup, sehingga ini termasuk kurang efektif karena belum sesuai

aturan yang berlaku. Pengawasan yang diterapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang sendiri adalah pengawasan terhadap pelaku usaha toko modern yang sudah memiliki izin lingkungan sebagaimana pelaku usaha harus menaati ketentuan yang sudah disepakati. Dinas Lingkungan Hidup tidak mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi apapun terhadap pelaku usaha toko modern yang tidak memiliki izin lingkungan, selama ini masih banyak usaha toko modern yang tidak memiliki izin lingkungan karena kurangnya pengawasan dari Satpol PP dalam menindaklanjuti Peraturan Daerah. Untuk pembinaan sendiri Dinas Lingkungan Hidup sudah dilakukan lewat adanya sosialisasi dengan memberikan arahan kepada pelaku usaha di Kabupaten Sampang, nantinya mereka akan diberi undangan oleh pegawai Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengikuti sosialisasi yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sampai saat ini dari Dinas Lingkungan Hidup untuk sosialisasi dilakukan 1x setiap tahunnya sejak tahun 2015, tahun kemarin mengundang semua pelaku usaha di kecamatan Sampang untuk mengikuti sosialisasi tentang bagaimana agar pelaku usaha dalam melakukan usaha tidak mengganggu lingkungan misalnya bagaimana sampah yang harus dikelola di masing-masing usaha, serta menjelaskan pentingnya mempunyai izin lingkungan sesuai Perbup No. 16 Tahun 2014 di Kabupaten Sampang, sehingga yang tidak punya izin akhirnya bisa mengurus izin dan mempunyai izin nantinya. Jika sosialisasi tahun kemarin diundang hanya Kecamatan Sampang, mulai tahun ini melingkup semua kecamatan di Kabupaten Sampang, mengundang nara sumber dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi.

Tindak lanjut dan kewenangan yang diberikan Bapak Moh. Zainullah, M.SI selaku Kepala Bidang Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditunjuk oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, menyatakan:

Dinas Lingkungan Hidup hanya memberikan pengarahan kepada pemohon izin untuk usaha toko modern sebagai bentuk pelayanan mengurus prosedur izin lingkungan sampai memiliki izin lingkungan berupa UKL-UPL/SPPL. Jadi setiap pelaku usaha toko modern wajib hukumnya memiliki izin lingkungan berupa Rekomendasi UKL-UPL/SPPL. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai izin lingkungan harus mengikuti sosialisasi agar pelaku usaha tahu bagaimana pentingnya suatu usaha yang akan dijalankan, karena pelaku usaha sendiri tidak mengerti pentingnya izin lingkungan bahkan pelaku usaha tidak tahu bahwa harus ada izin lingkungan. Izin lingkungan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan Rekomendasi berupa UKL-

UPL/SPPL. Jadi yang mengeluarkan izin atau lolos tidaknya yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup.

Tindak lanjut terhadap usaha toko modern, petugas yang berwenang dalam melakukan pengawasan terkait toko modern yang tidak memiliki izin lingkungan adalah aparat Satpol PP yang diberi Koordinasi langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan pernyataan Bapak Moh. Zainullah dalam wawancara, menyatakan:

Seluruh proses pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap toko modern yang sudah memiliki izin lingkungan di Kabupaten Sampang berdasarkan surat tugas dan penunjukan yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk mengawasi toko modern yaitu berada di Bidang Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan sebanyak 6 bulan sekali, yang bertugas memastikan data nya telah sesuai yang dikerjakan atau kurang. Namun untuk usaha toko modern yang tidak memiliki izin lingkungan dilakukan oleh Satpol PP, karena kami tidak berwenang dan tidak mengurus.

Hasil data yang diketahui masih banyak usaha toko modern yang tidak memiliki izin lingkungan, tentunya hal ini akan menghawatirkan lingkungan usaha. Menurut pernyataan Bapak Moh. Zainullah, M.SI selaku Kepala Bidang Penataan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatakan bahwa:

Selama ini pihak dari Dinas Lingkungan Hidup memang tidak pernah mengambil tindakan sanksi administratif mulai teguran lisan, tertulis maupun sampai penyegehan usaha toko modern. Hal ini disebabkan karena Dinas Lingkungan Hidup tidak mempunyai wewenang untuk usaha toko modern yang tidak memiliki izin lingkungan, kewenangan ada di aparat yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah yaitu Satpol PP. Namun untuk usaha toko modern yang sudah memiliki izin lingkungan jika terdapat pelanggaran maka sanksinya peringatan 3x, apabila telah diperingati masih melanggar maka akan dicabut izinnnya sementara. Jadi dari Dinas Lingkungan Hidup sebetulnya memacu pelaku usaha untuk mengarahkan prosedur izin hingga menaati keluarnya izin yang telah diberikan. Serta memberi himbuan sosialisasi kepada semua pelaku usaha baik yang sudah memiliki izin atau tidak memiliki izin sehingga diarahkan pentingnya usaha bagi lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup sebetulnya tidak ingin mematikan usaha mereka tetapi ingin mengarahkan bagaimana agar mereka tetap memenuhi kaidah lingkungan. Padahal tidak dipungut biaya sama sekali untuk mendaftarkan izin lingkungan, jadi upaya Dinas Lingkungan Hidup tetap proaktif untuk melakukan sosialisasi, sehingga dalam kasus ini Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Satpol PP selaku penegakan Peraturan Daerah.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam penertiban izin lingkungan terkait usaha toko modern, apakah kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam penertiban izin lingkungan berupa Rekomendasi UKL-UPL/SPPL terkait usaha toko modern di Kabupaten Sampang. Menurut pernyataan Bapak Moh. Zainullah, M.SI selaku Kepala Bidang Penataan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, mengatakan:

Tidak adanya wewenang untuk mengawasi yang tidak memiliki izin lingkungan ini, sehingga untuk mengurus kamipun tidak bisa selain pembinaan sosialisasi, kecuali yang bersangkutan ada izin lingkungan baru kami bisa menindak, tetapi jika tidak memiliki izin kami tidak bisa melaksanakan atau tidak punya kewenangan untuk berbuat sesuatu, sehingga kami hanya bisa memberi fondasi bahwa ada data yang berizin untuk diberikan ke pihak Satpol PP.

Hasil wawancara dengan Ibu Chairijah, SH.MH menjelaskan bahwa wewenang pihak Kesatuan Polisi Pamong Praja, yaitu:

Pihak Kesatuan Polisi Pamong Praja berwenang dalam melakukan penegakan Perda terhadap pelaku usaha yang tidak sesuai prosedur yang ada, disini Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi permasalahan pelanggaran izin lingkungan, kami juga berwenang memiliki hak dan akses untuk memasuki perkarangan dan ruang produksi usaha toko modern, melakukan pengawasan, pemeriksaan terhadap tempat usaha, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan alat-alat, hingga menutup tempat usaha yang tidak sesuai dengan syarat.

Penertiban merupakan wewenang Kesatuan Polisi Pamong Praja dalam hal ini, pelaksanaan kegiatan proses penindakan yang dilakukan oleh Ibu Chairijah, SH.MH di tempat usaha berupa:

Pengawasan terhadap kegiatan usaha toko modern, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan usaha, dan sanksi pada pelaku usaha yang melanggar peraturan daerah. Pengawasan terhadap pelanggaran Perda usaha toko modern yaitu tidak memiliki izin lingkungan bukan hanya dilakukan Pihak Satpol PP, tetapi masyarakat juga dapat berperan aktif dan bekerjasama dengan Satpol PP dengan memberikan informasi terkait temuan tidak sesuai prosedur serta pelanggaran Perda yang terjadi di lingkungan Sampang, sehingga pihak yang berwenang dengan segera menegakkan dan melakukan tindakan terhadap usaha tersebut. Dalam penindakan yang bersifat krusial, Satpol PP turun bersama Dinas Lingkungan Hidup, apabila pelanggaran tersebut begitu rumit maka Satpol PP melakukan sendiri.

Penertiban yang dilakukan oleh Kabid Penegakan Perda dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Sampang adalah melakukan pengawasan langsung ke toko modern di Kabupaten Sampang, hal tersebut dipertegas dengan pernyataan oleh Ibu Chairijah, SH.MH menyatakan:

Pihak Satpol PP dalam melakukan penertiban dibantu oleh Tim Ahli lainnya dan berbagi tugas dengan petugas lainnya untuk membagi tugas dalam melakukan pemeriksaan, serta penindakan. Pengawasan yang dilakukan di toko modern di beberapa tempat Kabupaten Sampang untuk menjaga ketertiban izin lingkungan dari tempat usaha selalu diawasi dari awal hingga akhir. Penindakan yang dilakukan oleh Satpol PP beserta tim maupun tim pembantu lebih ketika adanya laporan seperti tertangkap tangan pelaku usaha pada saat melakukan kegiatan yang melanggar peraturan daerah, maupun laporan dari OPD terkait, ataupun masyarakat lain. Setelah mendapat laporan terkait tindak pelanggaran Perda, Satpol PP langsung menuju ketempat usaha dan memeriksa baik berkas, hingga pemberian sanksi administratif.

Pemeriksaan berkas Satpol PP mengecek satu persatu berkas apakah pelaku usaha toko modern membuka usaha tersebut sesuai prosedur atau tidak, karena itu juga menjadi salah satu sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan selanjutnya, walaupun usaha tersebut tidak sesuai prosedur itu sangat memudahkan kami pihak Satpol PP beserta tim untuk melakukan penertiban secara cepat atas pelanggaran yang tidak bersifat substansial dengan pemberian peringatan untuk mengurus izin, jika tetap melanggar maka dapat menerapkan sanksi paksaan pemerintahan bestuurdwang oleh Satpol PP sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah.

Kondisi yang terjadi dilapangan yang membuat munculnya banyak kendala pada setiap tahapan-tahapan di usaha toko modern, hal tersebut membuat Satpol PP memiliki tugas yang berat dan susah dalam melakukan penertiban terhadap pelanggaran yang ada. Pernyataan Ibu Chairijah, S.H.M.H selaku Kepala Bidang Penegakan Perda dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang mempertegas:

Tanggung Jawab saya dan tim yang dalam menertibkan usaha toko modern yang melanggar Perda di Kabupaten Sampang lebih susah karena jumlah pelanggaran yang banyak tidak seimbang dengan jumlah personil Satpol PP, dari OPD terkait koordinasi sudah dilakukan, namun tidak memberi surat tembusan terkait usaha toko modern yang berizin, sehingga kami buta mana yang berizin dan tidak berizin, jadi kami harus turun tangan mengecek sendiri satu persatu ke lapangan yang tidak berizin didatangi dan yang berizin didatangi sehingga parsial kerjanya. Seharusnya kan tidak dengan demikian, setiap izin yang dikeluarkan oleh DLH

seharusnya diberi surat pemberitahuan atau tembusan kepada kami.

Hasil pengawasan terhadap usaha toko modern di Kabupaten Sampang. Menurut pernyataan Ibu Chairijah, SH.MH selaku Kabid Penegakan Perda dan Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang, menyatakan bahwa Aparat dari Satpol PP memang pernah mengambil tindakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintahan melalui teguran lisan, tertulis sampai penyegelan terhadap usaha toko modern yaitu di Jalan Pleyang, Torjun, dan Jrengik. Hal ini disebabkan karena usaha toko modern ini terindikasi pemalsuan tanda tangan yang diketahui dari pemilik tanah, tidak sesuai prosedur, termasuk tanpa melalui izin IMB dan izin lingkungan, sehingga batal demi hukum. Awalnya kami melakukan pemanggilan teguran 2x, peringatan 2x, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (SOP) sesuai Pasal 10 PP No. 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja: (1) Penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan SOP dan kode etik (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SOP dan kode etik diatur dalam Peraturan Menteri, Selanjutnya langsung kami segel. Setelah itu kami menjelaskan kewajiban sesuai Perda No. 7 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Modern dan Pasal 13 Perda No. 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Hasil wawancara dengan beberapa pelaku usaha toko modern, menyatakan bahwa tidak seluruh pelaku usaha mengetahui tentang izin lingkungan terkait usaha toko modern dan proses pendaftaran izin lingkungan karena sebagian pelaku usaha tidak pernah mendapatkan informasi tentang adanya Rekomendasi UKL-UPL/SPPL dari Dinas Lingkungan Hidup setempat.

Efektivitas Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Izin Lingkungan Terkait Usaha Toko Modern di Kabupaten Sampang

Penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern di Kabupaten Sampang agar merata perlu adanya pengawasan dan pengendalian yang ekstra dari pemerintah daerah agar pelaksanaan dari aturan bisa berjalan dengan baik. Maksud dari pengawasan dan pengendalian ini yaitu agar pemerintah dapat mengontrol urusan di daerahnya dengan baik, salah satunya dengan adanya perizinan. Suatu aturan dapat terlaksana atau tidaknya dari beberapa faktor yakni: faktor dari hukumnya sendiri, faktor dari penegakan hukum, faktor dari sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum itu sendiri, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Arti perizinan itu sendiri yaitu sebagai pengawasan dan pengendalian masyarakat agar dapat terlaksananya suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, serta menjamin akhir semua proses pekerjaan yang sedang dibangun sudah berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan. Apabila dalam perizinan tidak dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi yang sering digunakan mengenai perizinan ini adalah sanksi administrasi. Sanksi administrasi adalah sanksi yang digunakan bagi pelanggaran administrasinya, seperti denda, pembekuan sampai pencabutan sertifikat dan/atau izin, penghentian sementara pada pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah, dan tindakan administrasi.

Cara mengukur efektif atau tidaknya penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kesatuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak hukum atas Peraturan daerah terhadap pelaku usaha toko modern, peneliti akan menganalisa satu-persatu dari faktor-faktor diatas seperti dibawah ini :

Faktor Hukumnya

UUPLH, PP No. 27 tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, Perda No. 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Sampang diatur lebih rinci pada Perbup No. 16 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan. Memang norma pelaksanaan izin lingkungan yang terdapat di dalamnya sudah cukup bagus dan jelas. Yang dimaksud cukup bagus dan jelas yaitu kejelasan dari arti kata yang ada pada peraturan perundang-undangan sudah tidak menyebabkan kesimpangsiuran dalam penafsirannya. Seperti yang ada dalam Pasal 13 Perda No. 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang berbunyi: "Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin gangguan dan atau ijin lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan."

Pelaku usaha toko modern wajib memiliki izin lingkungan berupa Rekomendasi UKL-UPL/SPPL yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota setempat, sebagai tanda bahwa telah lulus dalam uji administrasi formulir UKL-UPL/SPPL dan memenuhi izin lingkungan dari tempat usaha toko modern tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi timbulnya dampak lingkungan yang dihasilkan usaha toko modern serta memberi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dihasilkan usaha toko modern sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern ini, penegak hukum yang dimaksud disini adalah Satpol PP. Keberadaan Satpol PP merupakan bagian dari proses penegakan hukum sebagai perangkat Pemerintah Daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah dalam penegakan Peraturan Daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Satpol PP merupakan garis depan dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, dan mental penegak hukum juga baik maka akan terlaksana pada sistem penegakan hukumnya. aturan yang sudah baik serta didukung oleh aparat Satpol PP sudah ada, tetapi tidak didukung oleh OPD terkait maka cukup sulit untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Peraturan yang ditopang pengawasan oleh Satpol PP akan menimbulkan kepatuhan yang lebih baik dibandingkan dengan aturan yang dikomunikasikan namun dibiarkan tanpa terkontrol.

Hasil wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang bersama Bapak Moh. Zainullah, M.SI, bahwa banyaknya usaha yang tidak memiliki izin lingkungan sudah menjadi rahasia umum. Dinas Lingkungan Hidup sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan izin pun sudah mengetahuinya. Sebenarnya Dinas Lingkungan Hidup mengenai usaha toko modern yang tidak memiliki izin lingkungan tidak punya wewenang, wewenang ada pada aparat Pemerintah Daerah yaitu Satpol PP. Dinas Lingkungan Hidup bekerjasama dengan Satpol PP dengan menginformasikan memberi data-data usaha toko modern yang sudah memiliki izin lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup hanya menindak dan mengawasi usaha toko modern yang sudah memiliki izin lingkungan. Kecuali yang bersangkutan ada izin baru bisa menindak, jadi apabila tidak memiliki izin, Dinas Lingkungan Hidup tidak punya wewenang untuk berbuat sesuatu, sehingga ada fondasi ada data-data untuk diberikan ke aparat Satpol PP.

Hasil wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang, adapun hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan Ibu Chairijah, SH.MH bahwa aparat Satpol PP yang berwenang untuk melakukan penindakan juga mengetahui bahwa banyak usaha yang tidak memiliki izin lingkungan. Satpol PP juga menambahkan bahwa pelanggaran tersebut dilakukan pelaku usaha yang tidak mau tahu. Kondisi ini disebabkan karena banyak dari masyarakat yang tidak paham prosedur perizinan atau bahkan tidak mengetahui

sama sekali. Selama ini Satpol PP melakukan pengawasan ke lapangan dikarenakan ada laporan dari masyarakat, masalahnya dari Dinas Lingkungan Hidup tidak memberikan tembusan. Dalam proses pengawasan tersebut, Satpol PP melakukan pengecekan ke usaha toko modern, baik yang tidak memiliki izin maupun yang sudah memiliki izin sehingga parsial kerjanya. Proses pengecekan tersebut dilakukan dengan memeriksa dokumen terkait izin dari Dinas Lingkungan Hidup. Sehingga hal ini lah yang membuat masih banyak pelaku usaha toko modern yang belum memiliki izin karena kurangnya informasi antara pihak Dinas Lingkungan Hidup dengan aparat Satpol PP. Jadi berdasarkan penjelasan diatas, faktor penegak hukum yang dalam hal ini yaitu dari aparat Satpol PP yang memainkan peran sangat penting dalam mengfungsikan tugas hukumnya. Ketika peraturan sudah ada tetapi instansi terkait dan penegak hukumnya tidak berjalan maka aturan hukum tersebut tidak akan berlaku sebagaimana semestinya.

Faktor Sarana

Sarana atau fasilitas memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum. Jika peraturannya sudah baik dan juga aparat penegak hukumnya sudah baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai maka tidak mungkin aturan hukum dapat berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, serta keuangan yang cukup dan lain-lain. Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka tidak akan mungkin aturan hukum menyasakan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Supaya sarana atau fasilitas yang ada dan akan diadakan dapat menghasilkan suatu efek yang positif sehingga efisien dan efektif, terutama bagi penegakan hukum secara menyeluruh yang begitu luas ruang lingkupnya, maka yang perlu diperhitungkan bukan hanya biaya yang harus dikeluarkan jika terjadi hambatan di dalam penyelesaian perkara, namun juga perlu dipertimbangkan yaitu biaya yang harus ada jika hambatan penyelesaian perkara itu tidak terulang lagi, sehingga ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pencari keadilan.

Hasil wawancara bersama dengan Bapak Moh. Zainullah, M.SI Dinas Lingkungan Hidup, bahwa untuk pendaftaran izin lingkungan usaha toko modern ini tidak dipungut biaya yaitu gratis. Hal ini karena dari pihak Dinas Lingkungan Hidup sudah mengambil dari anggaran lewat APBD. Seperti halnya pada usaha toko modern ini nantinya harus uji administrasi ke kantor untuk pemeriksaan formulir. Serta untuk Dinas Lingkungan dalam hal sarana sudah terpenuhi yakni sudah didukungnya dari fasilitas himbuan langsung (sosialisasi), radio, media elektronik, dan koran. Hal ini juga dilakukan oleh Satpol PP dengan mendatangi lokasi

walaupun akhirnya dampak anggaran menjadi membengkak, karena Satpol PP pemangkasan dari sisi anggaran namun sangat efektif pada saat itu.

Faktor Masyarakat

Penegakan hukum dari masyarakat tersebut bertujuan tercapainya keadilan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Karena mengingat bahwa masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar dalam mengartikan hukum dan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya yaitu baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut. Selain itu, faktor keberhasilan dari segi masyarakat juga diukur pada sumber daya manusia. Jika sumber daya manusianya masih ada yang dibawah rata-rata tentunya hal ini juga yang dapat menghambat dari suatu keberhasilan pada peraturan perundang-undangannya.

Masalah izin lingkungan terkait usaha toko modern yang ada di Kabupaten Sampang yang masih sangat banyak ini salah satu faktornya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum untuk ditaati. Kebanyakan masyarakat lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan dengan kepentingan umum. Selain itu kebanyakan masyarakat mulai dari pelaku usaha dan masyarakat sekitar usaha masih belum mengetahui yang namanya izin lingkungan berupa Rekomendasi UKL-UPL/SPPL. Maka perlu adanya sosialisasi yang ekstra dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang untuk membina dan memberi edukasi kepada masyarakatnya.

Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan pada umumnya mencakup nilai-nilai yang mendasari peraturan hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi yang dianggap positif (sehingga dianuti) dan negatif (sehingga dihindari) oleh masyarakat sekitar, seperti halnya dalam usaha toko modern di Kabupaten Sampang. Pada kenyataannya pelaku usaha dalam mengoperasikan usahanya tanpa menggunakan izin lingkungan merupakan sesuatu yang biasa bagi mereka, walaupun pemerintah sudah melarang dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan dipertegas dalam Peraturan Daerah dan diperjelas dalam Peraturan Bupati yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha.

Analisis kelima faktor tersebut maka keefektifan terhadap pengawasan usaha toko modern tanpa izin lingkungan di Kabupaten Sampang dinyatakan kurang efektif. Hal tersebut dinilai dari kelima faktor yang sudah diutarakan. Kelima faktor tersebut yang terpenuhi hanya dua faktor saja, yaitu faktor hukum dan sarana. Dapat dikatakan bahwa faktor hukum disini sudah terpenuhi

karena sudah ada Perda tentang Ketertiban Umum dan Ketentaraman Masyarakat, diperjelas dalam Perbup tentang izin lingkungan yang berjalan sebagaimana mestinya. Kemudian untuk sarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP Kabupaten Sampang juga sudah bagus yaitu sudah melakukan sosialisasi dan pengawasan sesuai standar perundang-undangan dalam artian untuk memenuhi perizinan usaha toko modern.

Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan proses penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern di Kabupaten Sampang

Kendala pertama yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern yaitu tingkat kesadaran pelaku usaha masih rendah. Masih banyak pelaku usaha toko modern yang belum memprioritaskan akan lingkungan. Tidak semua pelaku usaha mau untuk mendaftarkan izin lingkungan ke Dinas Lingkungan Hidup, dengan alasan tidak begitu penting, takut membayar administrasinya mahal dan prosedurnya yang rumit. Ada juga yang beranggapan bahwa Satpol PP selama ini diam saja dan tidak ada tindak lanjutnya, sehingga para pelaku usaha berpendapat bahwa dengan tidak adanya izin juga tidak terjadi apa-apa. Kendala yang sering dialami Satpol PP selaku penertib dilapangan adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang, selain sumber daya masyarakat yang ada di Kabupaten Sampang masih ada yang dibawah rata-rata. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya yang belum memahami dan tidak mengerti apa itu peraturan yang sudah diberlakukan, upaya dari pelaku usaha untuk memenuhi izin lingkungan berupa Rekomendasi UKL-UPL/SPPL usaha toko modern yang sudah disediakan oleh pemerintah juga rendah.

Kendala kedua, Kurangnya Koordinasi Dengan demikian Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sampang bekerjasama dengan aparat Satpol PP yang berperan membantu Dinas Lingkungan Hidup serta melakukan penegakan Perda terhadap pelaku usaha toko modern. Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan data-data mengenai usaha toko modern yang sudah memiliki izin lingkungan, lalu di informasikan kepada aparat Satpol PP. Namun dalam hal ini Satpol PP juga belum menerima surat pemberitahuan atau tembusan dari Dinas Lingkungan Hidup, sehingga menimbulkan tumpang tindih.

PENUTUP

Simpulan

Efektivitas penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern di Kabupaten

Sampang kurang efektif. Hal ini dibuktikan dengan jumlah 65 usaha toko modern, tetapi 51 yang tidak memiliki izin lingkungan di Kabupaten Sampang. Selain itu, dari kelima faktor yang terpenuhi hanya dua yaitu faktor hukum dan sarana sedangkan yang tidak terpenuhi ada tiga yaitu faktor penegakan hukum, masyarakat, kebudayaan. Dinyatakan bahwa faktor penegakan hukum karena kekurangan koordinasi yang jelas antara DLH dengan Satpol PP. Adapun faktor masyarakat yaitu kekurangan pengetahuan mengenai peraturan izin lingkungan terkait usaha toko modern, serta lebih mengutamakan mendirikan usaha toko modern dahulu daripada mengutamakan izin lingkungan berupa Rekomendasi UKL-UPL/SPPL. Sementara faktor kebudayaan dikarenakan pelaku usaha dalam mengoperasikan usaha toko modern tanpa menggunakan izin lingkungan merupakan sesuatu hal yang biasa.

Kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup dan aparat Satpol PP dalam melaksanakan proses penegakan hukum administrasi terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern di Kabupaten Sampang yaitu minimum tingkat kesadaran dan pengetahuan dari masyarakat yang tidak memahami mengenai peraturan izin lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, serta kurangnya koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Satuan Polisi Pamong Praja.

Saran

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, seharusnya lebih intensif dalam melakukan pembinaan sosialisasi yang lebih rutin kepada semua pelaku usaha toko modern terkait pentingnya memiliki izin lingkungan untuk meminimalisasi dampak yang kemungkinan terjadi akibat usaha toko modern melalui program-program baru dalam mensosialisasikannya. Selain itu lebih ditingkatkan kerjasama yang baik dan saling terkoordinasi sehingga tidak menyulitkan aparat Satpol PP maupun sebaliknya. Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sampang dalam melakukan Penertiban dan Penegakan Perda, diharapkan dapat lebih dimaksimalkan tugasnya dalam penegakan hukum terhadap izin lingkungan terkait usaha toko modern di Kabupaten Sampang. Serta apabila kurangnya informasi dari Dinas Lingkungan Hidup seharusnya Satpol PP juga meminta data, sehingga tidak saling menunggu.

Pelaku usaha toko modern diharapkan dapat memperhatikan dampak lingkungan yang dimungkinkan terjadi pada toko modern tersebut, dengan melakukan pendaftaran izin lingkungan hingga memperoleh Rekomendasi UKL-UPL/Persetujuan SPPL yang merupakan salah satu bukti legal atas izin lingkungan yang disahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota setempat, yang harus dimiliki oleh pemilik usaha

toko modern karena hal tersebut merupakan salah satu kewajiban pendirian usaha toko modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, Ahmad dan Heryani, Wiwie. 2012. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta: Kencana.
- Ali, H. Zainudin. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Basri, Abdul. 2018. Puluhan Toko Modern Tidak Mengantongi Izin Lingkungan. <https://radar.jawapos.com/radarmadura/read/2018/02/22/51705/puluhan-toko-modern-tak-kantongi-izin-lingkungan>. Diakses 25 Mei 2018. Pukul 01.24 WIB.
- Dedi Rainer, Pengertian Efektivitas Menurut Para Ahli, Rumus, Aspek. <http://www.sepengetahuan.com/2018/03/pengertian-efektivitas-menurut-para-ahli-rumus-aspek-contoh.html>. Diakses 05 September 2018. Pukul 23.14 WIB.
- Hadjon, Philipus M. 1993. Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika.
- _____, dkk. 1995. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajahmada University Press.
- Helmi. 2013. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika.
- Helmi. "Kedudukan izin lingkungan Dalam Sistem Perizinan di Indonesia". Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2 No 2.
- HR, Ridwan. 2003. Hukum Administrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.
- Johan, Teuku Saiful Bahri. 2018. Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tatanan Reformasi Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Makmur. 2010. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Miftahudin Husen. Diluar 9 Kabupaten/Kota Ini Tak Boleh Bangun Minimarket. 2015. Jakarta. <http://m/metrotvnews.com/ekonomi/mikro/0k8vG5W-N-di-luar-9-kabupaten-kota-ini-tak-boleh-bangun-minimarket>. Diakses 19 September 2018. Pukul 16.54 WIB.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman

- Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72).
- Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur: 334-7/2015).
- Peraturan Bupati Sampang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Izin Lingkungan.
- Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sampang.
- PEMKAB SAMPANG. <https://sampangkab.go.id/wp-content/uploads/2018/02/ProfileSampang2017.pdf>. Diakses 9 Oktober 2018. Pukul 16.00 WIB.
- Raharja, Ivan Fauzani dan Dewi, Ratna. Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora. Vol 15, No 2. Juli - Desember 2013.
- Soerjono, Soekanto. 1983. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- _____. 1985. Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi. Bandung: Remadja Karya.
- _____. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Sutedi, Adrian. 2015. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syapriillah, Aditia. 2018. Buku Ajar Mata Kuliah Hukum lingkungan. Deepublish: Yogyakarta.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Strata Satu Universitas Negeri Surabaya. 2014. Pedoman Penulisan Skripsi.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).